

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ash-Shiddieqy, H. (1971). *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiarjo, M. (1998). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*. (S. Rosyidi, Penyunt.) Jakarta: Kencana.
- Damayanti, A. H. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dennis, R. A. (1985). *Applied Methods of Regional Analysis-The Spatial Dimensions of Development Policy*. (I. Masser, Penyunt.) London: Westview.
- Didin, H. (2006). *Shariah Principles On Management*. Jakarta: Gemani Insani.
- Djoko, H. (2005). *Srategi SDM dalam Menghadapi Persaingan Global*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fathoni, A. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah ,dalam Badrul Munir (editor) .* Depok: Rajawali Press.
- Hakim, d. A. (2000). *Sistwm Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hayati. (2014). Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah guna Memperkuat Intergrasi Nasional. *Jurnal Serambi Edukasi*, No.2 Vol. 2.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Kusnadi. (1999). *Pengantar Manajemen*. Malang: Unibraw.
- Ma'aruf, F. (1975). *Etika Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Mannan, M. (1970). *Islamic economics-Theory dan Practise*. London: Arnold Overseas.
- Mardalena, S. d. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung.
- Rahardjo, M. D. (1987). *Pembangunan Desa Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Richard, S. T. (2012). *Sosiologi (Sociology)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saefullah, E. T. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinn, A. I. (2006). *Manajemen Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suprihantoro, D. J. (1998). *Manajemen Umum*. Jakarta: BPPE.
- Suryadi, B. (2016). *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*. Bandar Lampung: Sai Wawai.
- Syaukani, d. (2007). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zaidan, A. K. (1983). *Hak-Hak Rakyat Dan Kewajiban Negara Dalam Islam*. Yogyakarta: Lingkaran Studi Nusantara.

2. Jurnal

Haris, A. (2015). Studi Media dan Perpustakaan Urbanisasi. *Jurnal Sosial*, No.1 Vol.XIV.

Hayati. (2014). Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah Guna Memperkuat Integrasi Nasional. *Jurnal Serambi Edukasi*, No.2 Vol.2.

Karimah, F. (2014). Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon,Kec. Deket,Kab. Lamongan). *Jurnal Hukum*, No.4 Vol.2.

Luthafia, A. R. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonom Daerah. *Journal of Rural and Davelopment*, No.2 Vol.4.

Mewvi, W. L. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Permen Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, No.2 Vol.12.

Pahlevi, I. (2016). Dana Desa dan Permasalahannya. *Jurnal Hukum*, No.17 Vol.7.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa.

4. Data Online

Jimly Assididqie, Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah dalam <http://www.Legalitas.org> diakses pada pukul 11.23 WIB

<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/> diakses pada tanggal 25-11-2018 diakses pada pukul 13.05 WIB

Dinar Aji Atmaja, “Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”, terdapat dalam <http://eprints.ums.ac.id/42652> , Diakses terakhir tanggal 4 Desember 2018 pukul 20.15 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar> diakses terakhir pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 11.15 WIB.

Fatwa MUI, ”*Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik menurut islam*” terdapat dalam <http://www.fikihkontemporer.com>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 14.40 WIB.

<http://adiwarno.com/index.php/first> Diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 15.14 WIB.

https://semayuselomerto.wonosobokab.go.id/postings/details/324/Data_Penduduk.HTML diakses pada 14 Februari 2019 pukul 14.51 WIB.